

# MADRASAH DAN MASALAH JATI DIRI PENDIDIKAN ISLAM

---

**Imam Suprayogo**

**Rektor UIN Malang**

*According to 'Undang-Undang Sisdiknas' no. 20 of the year 2003, both the position and the status of Madrasah are on a par with the public school. Most people, however, still regard Madrasah as "second class" when seen from such aspects as: graduate prospects, school facilities, school buildings, students' as well as teachers' performances, management of the school, and cooperation with other institutions and stakeholders. Muslim society and the government, in this case, the Department of Religious Affairs, have come to realize these unfavorable situations, so that some efforts have been made to build a better condition of Madrasah. The Department of Religious Affairs has been trying to improve Madrasah by developing some strategies through the establishment of Madrasah Unggulan (Khusus), Madrasah Terpadu, Madrasah Tsanawiyah Terbuka, Madrasah Aliyah Program Keterampilan, and Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). The questions are: Will Madrasah be a progressive, modern, and reliable Islamic institution? Meanwhile, in the Muslim society, the current image is that Madrasah is an educational institution that has Islamic, Muslim and Islamic educational identities. Will the change imposed on Madrasah institution have some impact on its identity? This article is an attempt to answer these questions.*

## **A. Pendahuluan**

Tuntutan untuk mewujudkan pembangunan generasi muda yang lebih baik senantiasa merupakan persoalan setiap generasi bangsa. Bangsa yang kuat dan maju secara imperatif memerlukan tersedianya sumber daya manusia yang me-

madai dari segi kualitas dan kuantitas. Metodologi pendekatan yang paling diandalkan sejak zaman klasik dan dipandang paling efektif untuk mewujudkan generasi berkualitas yang diharapkan adalah pendidikan. Pendidikan dipandang penting oleh setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap keluarga, bahkan

secara intrinsik, pendidikan adalah kebutuhan setiap individu untuk membentuk dirinya menjadi manusiawi secara personal, sosial, kultural, dan religius. Pendidikan kemudian disadari sebagai aspek kehidupan universal, dalam arti bahwa pendidikan memang di pandang penting dalam rangka memelihara dan membangun kehidupan dunia yang lebih maju, lebih aman, lebih damai, dan lebih sejahtera. Badan dunia yang mengurus pendidikan, yakni UNESCO, sepenuhnya menyadari akan pentingnya pendidikan untuk semua orang, yang dikemas dalam program Education for All.

Begitu pentingnya pendidikan, sehingga bidang apa pun yang dipandang penting bagi kehidupan di segala aspek dan dalam setiap dimensinya senantiasa menempuh pendekatan pendidikan ini. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai proses personalisasi, enkulturasi, regenerasi, bahkan dalam spektrum yang lebih luas pendidikan menjadi alat melakukan rekayasa-rekayasa sosial, politik, ekonomi, dengan berbagai pola aksi seperti sofistikasi, politisasi, doktrinasi, dan semacamnya. Atas dasar ini, maka pendidikan diselenggarakan oleh setiap atau seluruh lembaga sosial, juga lembaga keagamaan, sehingga menjadi persoalan publik, karenanya itu juga secara praktis menjadi bidang garapan pemerintahan. Setiap negara membuat berbagai per-

aturan untuk mengontrol pendidikan, sekaligus untuk menjamin bahwa pendidikan yang dilaksanakan di negerinya benar-benar menyumbang secara signifikan bagi kemajuan negara dan bangsanya. Kemajuan sebuah negara dan bangsa ditentukan oleh kualitas anak-anak bangsa atau warga negaranya; namun, kualitas anak-anak bangsa itu sudah pasti ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan di negara atau bangsa dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya di tempat-tempat lainnya, pendidikan berkembang sebagai respons alamiah dan kultural dari setiap generasi, sehingga pada awalnya pendidikan bersifat informal atau non formal. Setiap keluarga dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan cita-cita regenerasinya. Demikian juga, masyarakat Islam melaksanakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi religiusitasnya. Lembaga pendidikan Islam yang tertua dan muncul sebagai respons alamiah dan kultural dalam komunitas muslim adalah pondok pesantren, yang menurut A. Malik Fadjar (1998:111, 113) merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang *indigeneous* Indonesia. Sedangkan madrasah, secara simplistik, dipandang tidak *indigeneous* Indonesia, karena kata madrasah itu sendiri bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Arab.

Bagaimanapun, saat ini madrasah telah populer sebagai lembaga pendidikan formal yang sebagian besar dikelola oleh lembaga sosial-keagamaan di dalam komunitas muslim Indonesia (yang dengan demikian berstatus swasta), dan sebagian kecil dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama, yang berstatus negeri. Di tengah-tengah geliat kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama di era reformasi ini, dalam rangka membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan terhormat, pendidikan segera memperoleh perhatian yang agak serius dari negeri ini. Salah satu bentuk perhatian ini adalah dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari keseluruhan dana APBN. Namun, pada kenyataannya, angin segar ini tidak terlampaui menggembirakan, karena dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan, pemerintah hanya mampu merealisasikan 8 persen saja dari 20 persen yang diamanatkan oleh GBHN itu. Kenyataan ini persis sama dengan realitas yang dialami oleh berbagai program kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, seperti program Wajib Belajar 9 Tahun, yang menjanjikan pendidikan gratis bagi anak sekolah kelas 1-9. Program Wajar 9 Tahun tidak benar-benar terwujud karena masyarakat tidak merasakan perbaikan keadaan. Sekolah tetap saja merupakan program berbiaya

tinggi, yang kemudian tidak secara signifikan menyumbang bagi penurunan angka drop-out dan peningkatan angka partisipasi masyarakat di sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah.

Kendatipun madrasah tidak mengambil kesempatan dari tingginya tingkat drop-out dan rendahnya tingkat partisipasi sekolah, madrasah tampaknya dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Madrasah muncul sebagai penyelamat generasi muda dari buta huruf (*illiterasi*). Dari kenyataan ini saja, secara sederhana, dapat dipahami bahwa madrasah secara umum tidak menjadi pilihan yang setaraf dengan sekolah. Bahkan, lebih spesifik lagi, madrasah swasta menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat. Alasan-alasan masyarakat tidak menempatkan pilihan pendidikan kepada madrasah sejajar dengan pilihan kepada sekolah sesungguhnya banyak dan kompleks. Madrasah, bagaimanapun, dipandang sebagai sekolah kelas dua dari berbagai aspek: prospek lulusan, kelengkapan fasilitas pendidikan, efektivitas pembelajaran, penampilan fisik sekolah, performa tenaga pengajar dan siswa, manajemen kelembagaan, serta persoalan kerja sama dengan berbagai lembaga dan *stakeholders*.

Masyarakat muslim dan pemerintah—melalui Departemen Agama—telah menyadari kenyataan ini, sehingga dengan berbagai cara berupaya membangun *image* yang lebih baik terhadap madrasah. Departemen Agama memimpin berbagai upaya pembaharuan pendidikan madrasah dengan mengembangkan bermacam-macam strategi, seperti Madrasah Unggulan (Khusus), Madrasah Terpadu, Madrasah Tsanawiyah Terbuka, Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), dan lain-lain. Dengan berbagai terobosan itu, kita berhak bertanya-tanya: akankah madrasah menjadi lembaga pendidikan Islam yang maju, modern, dan terpercaya? Diakui atau tidak, di kalangan masyarakat muslim, madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang mencitrakan jati diri Islam, jati diri umat Islam, dan jati diri pendidikan Islam. Oleh karena itu, berbagai perlakuan kepada madrasah haruslah berpedoman kepada visi dan misi yang terkait langsung dengan upaya mewujudkan Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil'alam*; mewujudkan pribadi-pribadi dan umat muslim yang maju, sejahtera, menang (*ya'lu*), dan tidak kalah (*yu'la*) dalam persaingan duniawi maupun ukhrawi; dan mewujudkan pendidikan Islam yang benar-benar mengejawantahkan nilai-nilai yang secara konstruktif mengantarkan

kepada kehidupan yang lebih aman, damai, nyaman, terhormat, dan sejahtera (*hasanah fiddunya wa hasanah fil-akhirah*).

## B. Historical Background Madrasah

Pada awal pertumbuhannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang secara khusus dirancang sebagai wadah pembinaan generasi muda muslim agar mereka memahami ajarannya secara memadai, baik dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran agamanya maupun dalam rangka mewujudkan generasi yang berkehidupan maju, dinamis, dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan petunjuk Islam. Madrasah menjadi wadah kegiatan pendidikan tempat terjadi *transfer of knowledge*, pelatihan berbagai keterampilan hidup (*life skills*), dan penanaman nilai-nilai (*internalization of life values*).

Pada priode perkembangan awal, jauh sebelum munculnya al-Ghazali (w. 1111), madrasah mengajarkan berbagai pengetahuan keagamaan, melatih pengamalan ajaran-ajaran Islam, termasuk praktik ibadah, muamalah, serta akhlak. Madrasah priode awal tidak mengenal kategorisasi ataupun polarisasi ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada persoalan dikotomi ilmu. Semuanya jenis ilmu pengetahuan dipandang sebagai

bagian dari ilmu-ilmu Islam, karena memang ilmu-ilmu itu dikembangkan oleh ulama-ulama muslim yang tidak diragukan integritas keislamannya. Al-Ghazali lah yang kemudian membuat pembedaan ilmu-ilmu keislaman (*'ulumuddin*) dan ilmu-ilmu umum, dengan menekankan bahwa mempelajari ilmu-ilmu keagamaan Islam hukumnya *fardlu 'ain*, sedangkan mempelajari ilmu-ilmu umum hukumnya *fardlu kifayah*.

Dengan demikian, madrasah (dari bahasa Arab) adalah sebuah sekolah (yang mungkin berasal dari bahasa Inggris, *school*) seperti kita kenal di Indonesia. Bahkan, dalam berbagai literatur berbahasa Inggris, *school* diterapkan untuk menyebut mazhab atau aliran pemikiran. Mazhab atau aliran pemikiran itu pada dasarnya juga merupakan lembaga, jika ditinjau dari segi domain pemikirannya yang sudah teratur dan sistematis. Setiap mazhab membentuk forum kajian untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dari perspektif keagamaan. Forum-forum kajian itu disebut madrasah karena di dalamnya orang melakukan kajian berbagai persoalan dan mencari pemecahannya dengan ijtihad, tidak terbatas pada kajian ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga ilmu-ilmu yang kita kenal saat ini sebagai ilmu-ilmu umum. Kendatipun lembaga-lembaga kajian itu meng-

anut metodologi ijtihad tertentu, mereka tetap membahas segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada saat ini, ijtihad masih terbuka bagi setiap orang, belum ada pernyataan fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dengan demikian, madrasah pada priode pertumbuhannya adalah lembaga kajian ilmiah, tempat melakukan *tadarrus*, yang bercorak inklusif, bebas, dinamis, dan progresif. Karena itu madrasah memiliki reputasi yang cemerlang, seperti lembaga kajian di era modern. Itulah *madrasah Islam* sebenarnya, yakni tempat atau pusat kajian ilmiah (*tadaarrus al-'ilm*). Jika kita menggunakan pemaknaan lama ini untuk konteks modern, maka lembaga-lembaga seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), The Habibie Center, MUI, Bahtsul Masailnya NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, di samping sekolah apapun termasuk lembaga-lembaga pelatihan dan kursus—semuanya dapat disebut madrasah.

Seiring dengan menguatnya pemikiran mazhab, meningkatnya peserta kajian, munculnya ketegangan karena unsur resistensi kelompok, eksklusivisme mazhab, serta deklarasi ditutupnya pintu ijtihad, maka madrasah-madrasah memfokuskan diri pada kajian yang semakin menyempit, dan terdistorsi pada mengkaji pemikiran mazhab tertentu, tanpa wacana dan perbandingan. Madrasah yang inklusif menjadi eksklusif, dan

inilah *madrasah mazhabi* dalam pengertian yang sebenarnya, yang mengabdikan bukan terutama kepada Islam universal, tetapi kepada kelompok mazhabnya sendiri. Domain pendidikan Islam di madrasah ini sudah sangat sempit menjadi sekedar pewarisan pemikiran dan nilai-nilai mazhab. Demikian pula, orientasinya bukan lagi kajian dan pemecahan masalah kehidupan secara luas dari perspektif Islam serta upaya mengejawantahkan nilai-nilai universal Islam, melainkan berorientasi mempertahankan mazhab dan beragama menurut mazhabnya.

Selain madrasah Islam dan madrasah mazhab seperti dijelaskan di atas, ada juga *madrasah dikotomis*. Madrasah dikotomis lahir pada era modern, yakni ketika berbagai ilmu pengetahuan dari Eropa memasuki kawasan muslim di berbagai penjuru, sehingga dikenal tidak hanya ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga ilmu-ilmu Barat yang sekuler. Madrasah ini memandang perbedaan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu non keislaman sebagai bersifat substantif, dalam pengertian bahwa perbedaan itu bersifat realistik, bukan sekedar untuk memudahkan penjelasan atau kategorisasi. Dalam pandangan madrasah dikotomis, ilmu-ilmu keislaman (ilmu-ilmu agama, *'ulumuddin*) adalah ilmu yang berkenaan dengan akhirat, sedangkan ilmu-

ilmu non keagamaan (atau ilmu-ilmu umum: alam, sosial, dan humaniora) sebagai ilmu duniawi. Tampaknya mereka memahami secara keliru hadis Nabi yang menyatakan: "*Barang siapa yang menghendaki dunia, maka haruslah dengan ilmu; demikian juga, barang siapa menginginkan akhirat, maka harus pula dengan ilmu*". Hadis ini, menurut saya, mengungkapkan bahwa untuk urusan apa pun harus dilakukan oleh ilmu, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Alquran ketika memperingatkan kita: "*Janganlah mengikuti segala sesuatu tanpa perspektif ilmu pengetahuan; sebab, setiap pendengaran, penglihatan, dan pemikiran, akan dimintai pertanggung jawaban.*"

Madrasah dikotomis menyuarakan wacana ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi bukan terutama untuk menegaskan bahwa kedua kategori ilmu itu sama pentingnya, melainkan untuk menekankan bahwa ilmu-ilmu duniawi (dalam hal ini adalah ilmu-ilmu umum atau non agama, atau non-Islam) adalah ilmu yang remeh, dan karena itu ditempatkan pada kelas dua. Madrasah dikotomis inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap semakin jauhnya umat Islam dari wacana ilmu pengetahuan dan teknologi; atau sebaliknya, madrasah ini pula yang bertanggung jawab atas pemikiran reduksionis mengenai Islam yang hanya terbatas pada persoalan

akhirat, sehingga pembedaannya bukan lagi duniawi dan ukhrawi, melainkan Islam dan sekuler, atau Islam dan dunia. Perspektif dikotomis inilah yang secara langsung menjadi faktor kemunduran peradaban Islam. Umat Islam tidak lagi berurusan dengan kemajuan dan dinamika, malahan cenderung konservatif dan fatalistik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa saat ini tidak ada upaya membangun kembali konseptual ilmu yang lebih memuaskan pandangan religius umat Islam. Para cendekiawan muslim dalam hal ini menggagas dan menggerakkan proyek Islamisasi sains (*Islamization of knowledge*), yakni mengislamkan berbagai ilmu dan sains yang berasal dari Barat, yang mereka kategorikan sebagai sekuler dan atheistik. Proponen gerakan islamisasi sains di kalangan cendekiawan muslim antara lain, Ismail Raji al-Faruqy dengan lembaganya International Institute of Islamic Thought (IIIT), Syed Naquib Al-Attas, Hassan Bilgrami, Ziauddin Sardar, Endang Saifuddin Anshari, A.M. Saefuddin, dan M. Dawam Rahardjo.

Madrasah integralistik muncul sebagai respons terhadap madrasah dikotomis. Berbeda dengan madrasah dikotomis, madrasah integralistik mempromosikan bersatunya kembali ilmu-ilmu dalam khazanah keislaman. Berbagai ilmu atau sains yang oleh madrasah dikotomik dipandang

sekuler, kelas dua, dan tidak terlalu penting, dipandang sebagai bentuk-bentuk *hikmah*, yang—seperti kata Nabi—di mana pun dan dari mana pun umat mukmin menemukannya haruslah diambil, karena hikmah itu adalah miliknya. Madrasah integralistik ingin menyerap ilmu apa pun untuk dikembalikan kepada sumbernya yaitu Allah, sebagaimana dituangkan dalam Alquran dan as-sunnah. Atas dasar ini, maka tidak lagi ada diskrepansi atau dikotomi ilmu.

Lebih jauh dari sekedar menyatakan kembali ilmu-ilmu—mungkin seperti proyek yang digarap oleh Stephen Hawking dari kalangan saintis Barat untuk menemukan dan merumuskan apa yang disebut *theory of everything*—madrasah integralistik mempromosikan *Islam-based knowledge*, yakni membangun ilmu pengetahuan berdasarkan Islam. Jika ditelusuri sejarah terbentuknya peradaban Islam yang gemilang pada abad pertengahan, yang fondamen utamanya berupa khazanah ilmu-ilmu, kebebasan berpikir dan berkeaktivitas di bidang ilmiah, maka gagasan dan proyek *Islam-based knowledge* ini bukanlah gagasan dan proyek baru. Para ulama muslim pada masa itu melakukan penelitian ilmiah dalam berbagai bidang, dengan memanfaatkan faktor inspirasi dari isyarat-isyarat ilmiah di dalam Alquran.

Para ilmuan muslim itu merasa

tertarik untuk mengungkap isyarat-isyarat ilmiah dalam Alquran seperti disebutkan di dalamnya ada air (*al-mâ'*), api (*an-nâr*), tanah (*al-ardh, at-thurab*), angin dan udara (*an-nafas, al-hawa*), langit-langit (*as-samâ', as-samâwât, al-âfâq*), manusia (*al-basyar, al-insân, an-nâs*), waktu (*al-waqt, ad-dahr, as-fajr, an-nahâr, al-lail*), gunung (*al-jabal*), hewan (*al-hayawân, al-bahîmah*), unta (*al-jamal*), lebah (*an-nahl*), semut (*an-naml*), sapi (*al-baqârah*), dan lain-lain. *Scientific signals* yang disebutkan itu baru menyangkut isyarat-isyarat obyek fisik dan material, yang dalam perspektif Alquran semuanya itu diatur oleh sebuah ketentuan Allah berupa hukum kepastian alam (*taqdîrullâh*), seperti dalam ayat *wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdîra*. Selain *scientific signals* berupa isyarat-isyarat fisik-material, di dalam Alquran terdapat demikian banyak isyarat ilmiah menyangkut gejala sosial, yang dikembangkan oleh rumpun ilmu sosial dan humaniora. Di antara isyarat-isyarat ilmiah sosial adalah adanya komunitas (*al-ummah, ath-thâ'ifah, al-qabîlah, asy-syu'ûb, al-fi'ah*), primordialisme kelompok (*syu'u biyyah*), kerja sama (*at-ta'âwun*), pluralisme (*at-tafriqah*), konsolidasi (*at-ta'âruf*), dan lain sebagainya.

Seperti halnya gejala-gejala fisik di alam semesta, gejala-gejala sosial juga diatur menurut ketentuan Allah yang sama tingkat ke-

pastiannya, kendatipun ukuran-ukurannya berbeda. Ketentuan Allah yang mengatur gejala-gejala sosial itu disebut dalam Alquran dengan *sunnatullâh*, yang juga bersifat tetap dan pasti (*wa lan tajida lisunnatillâhi tabdîla, wa lan tajida li sunnatillâhi tahwîla*). Mereka merasa yakin bahwa Alquran yang merupakan kalam Allah itu bukanlah omong kosong. Apa pun yang dikemukakan di dalamnya pasti ada realitasnya di alam semesta, yang harus diteliti, bukan terutama untuk membuktikan (seperti pembuktian-pembuktian ilmiah), melainkan untuk memahaminya dan untuk memanfaatkan pengetahuan (ilmu) untuk perbaikan dan kemajuan kehidupan umat manusia. Dengan demikian, madrasah integralistik ingin mengembalikan citra madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu memproduksi berbagai ilmu pengetahuan berdasarkan Islam, bukan dalam kerangka *ilmu-untuk-ilmu*, melainkan ilmu pengetahuan untuk kemashlahatan hidup manusia.

### C. Madrasah di Indonesia

Paparan di atas mengungkap *historical background* madrasah di dunia Islam yang mengalami pasang surut, mulai dari citranya sebagai madrasah Islam, madrasah mazhab, madrasah dikotomik, dan madrasah integralistik, ditinjau dari segi peran



ilmiah yang dijalankan. Di Indonesia, madrasah sudah dikenal luas sebagai lembaga pendidikan yang dikelola umat Islam. Bagi pemerintah, madrasah adalah sekolah umum berciri khas keagamaan (Islam). Apresiasi pemerintah dengan menyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam ini adalah hal yang relatif baru, setelah sebelumnya madrasah menentukan nasibnya sendiri dan berusaha melakukan upaya-upaya akomodatif yang dipandang perlu dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih memadai bagi generasi muda. Madrasah berupaya mengikuti gelombang dan *mainstream* berbagai perubahan kebijakan pemerintah tentang persekolahan, sembari tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah keagamaan, seperti yang tampak pada perubahan-perubahan kurikulum madrasah, mengikuti perubahan yang sama di sekolah umum.

Sejarah perjalanan madrasah—sebagai lembaga pendidikan—selalu berliku-liku, dan pada kenyataannya tidak pernah lepas dari berbagai problem. Kendatipun madrasah adalah lembaga pendidikan yang secara nyata menyumbang bagi proses pencerdasan dan pembinaan kepribadian generasi muda bangsa ini; dengan berbagai alasan, negara atau pemerintah negeri ini tidak dapat memberikan perlakuan yang lebih adil kepada madrasah jika di-

bandingkan dengan perhatian utama kepada sekolah. Para pemuka madrasah berupaya menyesuaikan berbagai hal dengan tuntutan atau tekanan pemerintah agar madrasah memperoleh perhatian yang lebih proporsional. Mereka memandang bahwa perlakuan yang sama tidak mungkin terwujud karena secara kelembagaan—dan ini terkait dengan politik birokrasi—madrasah bernaung di bawah Departemen Agama, sementara sekolah umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena anggaran pendidikan nasional disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional, maka sekolah umum di bawah pengawasannya menikmati sepenuhnya dana pendidikan dari negara. Madrasah, tidak seperti sekolah umum, dikelola bukan dengan anggaran pendidikan, melainkan dengan anggaran Departemen Agama. Lebih mengesankan lagi adalah keadaan madrasah-madrasah swasta yang jumlahnya sangat banyak, dengan sedikit perkecualian.

Gambaran umum madrasah dicitrakan tidak lebih bermutu dari sekolah umum. Secara umum juga, madrasah tidak menunjukkan citra yang dapat dipercaya untuk mengemban misi pendidikan untuk mengantarkan generasi muda bangsa ini kepada kemajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup. Keadaan mad-

rasah, dengan berbagai faktor yang dapat diamati, dapat menjadi mimpi buruk masyarakat yang menyekolahkan generasi mudanya di madrasah. Namun, jika diteruskan, kita pun dapat bertanya, siapa lagi yang bertanggung jawab membangun citra madrasah yang lebih maju? Di sisi lain, yakni dalam kerangka fungsionalnya sebagai lembaga pendidikan Islam, bagaimana madrasah membangun jati diri Islam, umat Islam, dan pendidikan Islam? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di depan telah terbentang dilema, apakah madrasah menempuh jalur-jalur akomodasionisnya dengan sekolah umum, untuk memperoleh apresiasi dan dukungan yang proporsional dan lebih adil dari pemerintah; *ataukah* madrasah berupaya memusatkan diri pada kajian ilmiah sekaligus memanfaatkan hasil-hasil kajiannya untuk membangun kepribadian generasi muda muslim yang lebih maju, lebih dinamis, dan lebih sejahtera?

#### D. Membangun Jati Diri Madrasah

Jati diri madrasah tidak semata-mata mencakup jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Dengan demikian, problem membangun jati diri bukanlah persoalan yang sederhana, dan oleh karenanya

merupakan gagasan yang tidak terlalu mudah, terlebih lagi mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi madrasah saat ini.

Jika kita menggagas pengembangan madrasah menuju pemulihan citra diri atau menemukan kembali jati diri madrasah yang hilang secara radikal, maka sudah tampak di depan mata berbagai tuntutan yang sangat ideal dan dalam batas-batas tertentu sangat menjanjikan. Dari satu sudut pandang saja, misalnya dengan melihat keadaan madrasah yang tidak lebih berfungsi sebagai wadah pelaksanaan pendidikan Islam bagi generasi muda, sudah jelas sekali adanya tuntutan agar madrasah tidak sekedar sebagai wadah pelaksanaan, tetapi di balik itu juga madrasah harus—bukan hanya perlu—melakukan proyek yang lebih mendasar, yaitu melakukan penelitian atau ijtihad untuk menemukan dan merumuskan teori-teori ilmu pengetahuan yang dibutuhkan sebagai kurikulum pendidikan. Dengan adanya proyek keilmuan dan kajian tersebut, kurikulum pendidikan madrasah akan selalu bersifat progresif, dinamis, dan tentunya memenuhi kriteria *link and match*, baik dengan dunia kerja ataupun kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Madrasah akan selalu *up to date*.

Sekarang ini, bahkan citra madrasah sebagai tempat tadarrus pun telah pupus, karena madrasah

tidak memiliki struktur, infra-struktur, dan sarana apa pun untuk mengembangkan kajian dalam pengertian yang selaras dengan makna sejatinya. Bahan pendidikan yang dipakai oleh madrasah, demikian juga kurikulum dan berbagai macam metodologi pembelajaran yang dikembangkan, semuanya itu ditempuh dengan mengadopsi milik sekolah umum. Memang boleh jadi menguntungkan jika madrasah menerapkan prinsip meniru, mengubah, dan menambah, yang selalu merupakan jurus andalan dalam rangka memenuhi sikap dan kehendak akomodasionisnya; namun, prinsip itu terbukti membuat madrasah menjadi terlena dengan nikmatnya menjadi sekedar pemakai, tanpa menempuh pekerjaan melelahkan untuk menemukannya. Akan tetapi, meniru itu dapat menjadi penyakit jika tidak disertai dengan kreativitas dalam pengertian sesungguhnya.

Seperti dikemukakan di atas, ditinjau dari segi perhatian kepada pengembangan ilmiah dan keislaman, maka citra madrasah Islam yang bercorak inklusif, universal, integratif, dan progresif harus dapat dikembalikan, dengan mewaspadaikan corak atau tipe madrasah yang distorsif, seperti madrasah mazhabi, dan madrasah dikotomi. Reputasi madrasah diharapkan akan mencuat jika dari madrasah muncul sentra kajian yang memproduksi berbagai ilmu-ilmu yang

diperlukan bagi proses pendidikan generasi muda.

Kendatipun, sangat mendesak untuk melakukan perubahan mendasar yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan madrasah, namun sepanjang menyangkut fenomena madrasah yang tidak sederhana itu, maka upaya-upaya pengembangannya tentunya perlu memperhatikan watak-watak laten –tapi sangat berpengaruh– dalam diri madrasah. Karena adanya watak-watak laten itu, maka problem membangun jati diri madrasah, yang di dalamnya tercakup dan dipertaruhkan jati diri Islam, dan jati diri umat Islam, tidak serta merta mudah dengan menerapkan pendekatan *external treatment*, tetapi membutuhkan pemahaman yang cukup memadai mengenai tradisi internal madrasah yang telah terbentuk sejak dini, yakni ketika madrasah masih merupakan respons alamiah dari kebutuhan masyarakat untuk membina generasi mudanya.

Menyoal upaya membangun jati diri madrasah, semestinya kita memperhatikan perbedaan status madrasah, negeri atau swasta, juga memperhatikan tingkat kemajuan madrasah, yakni sebagian tergolong madrasah yang tertinggal (*less developing madrasah*), sebagian lagi ada madrasah yang sedang tumbuh (*under developing madrasah*), dan sebagian kecil madrasah yang tergolong sudah maju (*developing madrasah*, atau

yang sudah *well-developed*). Madrasah tertinggal adalah yang jumlahnya paling banyak, terutama berada di pedesaan. Memang demikianlah, sehingga terkesan kuat bahwa madrasah merupakan fenomena pedesaan. Keadaannya, sebagian besar masih sangat sederhana—untuk tidak menyebut sangat memprihatinkan. Siapa saja yang berkesempatan menelusuri banyak desa di Indonesia, terutama yang berkomunitas muslim, akan menemukan madrasah yang keadaannya sangat memprihatinkan. Bangunannya sederhana, fasilitas pendidikan, kurikulum termasuk para gurunya berjalan apa adanya. Kesederhanaan itu, lebih-lebih tampak lagi bagi madrasah yang berada di masyarakat miskin. Akan tetapi anehnya, lembaga pendidikan seperti itu, masih didukung dan diminati sebagian masyarakat.

Para guru madrasah tertinggal ini biasanya, selain terdiri atas beberapa guru bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas, berasal dari tenaga honorarium yang tidak masuk akal. Dikatakan tidak masuk akal karena jumlah honor yang diterima pada umumnya amat kecil. Dalam berbagai kunjungan ke madrasah di Jawa Timur, tidak sulit menemukan seorang guru madrasah tetap, hanya berhonor Rp 100.000,- dan bahkan ada yang lebih sedikit daripada jumlah itu. Pemberian honor kecil itu, bukan karena

pihak pengurus madrasah bersifat pelit, melainkan semata-mata karena tidak tersedianya dana. Pada umumnya, sumber dana madrasah berasal dari SPP yang sangat kecil yang diperoleh dari para siswa. Jika besarnya SPP itu hanya Rp5.000,- dan ini pun belum tentu dibayar secara tertib, dikalikan, katakan siswanya 200 orang, maka hanya akan terkumpul Rp1.000.000,-. Besarnya pendapatan madrasah seperti ini akan digunakan membiayai seluruh kehidupan madrasah, termasuk honorarium para gurunya itu. Inilah keadaan sebagian besar madrasah.

Beberapa guru bantuan pemerintah yang diperoleh madrasah swasta di beberapa tempat diangkat sekitar pada awal tahun 1970-an, atas dasar lulusan UGA (Ujian Guru Agama). Ketika itu pemerintah mengangkat dalam jumlah besar guru agama untuk madrasah. Karena pada saat itu belum banyak lulusan PGA (Pendidikan Guru Agama), maka ditempuh cara mengangkat para guru madrasah yang telah mengajar di sana. Kebijakan ini tentu sangat menguntungkan kehidupan madrasah. Akan tetapi, kebijakan itu tidak berlangsung secara kontinu, melainkan semusim itu saja. Selanjutnya, satu hal yang seharusnya diantisipasi adalah bahwa beberapa tahun terakhir ini guru-guru bantuan pemerintah tersebut, secara berangsur sudah memasuki

masa pensiun. Pada gilirannya, jika benar bahwa tiang penyangga madrasah adalah para guru bantuan pemerintah ini, maka dengan masuknya mereka pada usia pensiun, tidak mustahil akan diikuti pula oleh berhentinya nafas madrasah swasta.

Bagi madrasah yang bernasib terbelakang seperti ini, yang diperlukan bukan konsep-konsep bagaimana memenangkan kompetisi, membangun kepercayaan diri, kemandirian dan seterusnya, melainkan uluran tangan agar bisa memperpanjang gerak nafas mereka. Jadi, persoalan mereka adalah sangat ril, yaitu bagaimana agar bisa sekadar membayar honorarium para guru, yang besarnya minimal bisa digunakan untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, program guru bantu yang beberapa tahun terakhir diperkenalkan oleh pemerintah akan sangat membantu madrasah. Sasaran bantuan-bantuan keuangan bukan saja murid madrasah, melainkan yang lebih strategis adalah kehidupan para gurunya ini. Para guru bukan saja memerlukan disapa, ditatar, difasilitasi, tetapi yang lebih dari itu adalah dibantu kehidupannya. Hal ini penting karena, tampak sekali, para guru madrasah ternyata juga bukan selalu berasal dari kelompok ekonomi kuat.

Selanjutnya, menganggap sederhana terhadap madrasah seperti ini tidak selalu tepat sebab, ter-

nyata, sekalipun belum ada kajian yang mendalam, ada kesan umum bahwa para lulusan madrasah seperti ini, ternyata dianggap cukup memadai oleh masyarakatnya. Sekalipun tergolong kategori terbelakang, mereka mampu mengantarkan lulusannya menjadi warga masyarakat yang, bisa jadi, tidak kalah dari lulusan lembaga pendidikan lain yang dianggap lebih maju. Bahkan, dalam beberapa hal, memiliki kelebihan, misalnya, dalam hal memimpin kehidupan keagamaan yang selalu dibutuhkan oleh setiap komunitas muslim. Lulusan madrasah akan lebih berani tampil di depan. Lulusan madrasah tidak sedikit yang menduduki posisi penting tingkat desa, dan bahkan lebih daripada itu. Pengalaman saya memimpin perguruan tinggi, baik di Universitas Muhammadiyah Malang maupun di STAIN yang saat ini telah berubah menjadi UIN Malang, ternyata tidak sedikit dosen baru lulusan pascasarjana perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti : Airlangga, ITB, UGM, Unibraw yang berasal dari lulusan madrasah tipe terbelakang ini. Inilah menurut saya adanya "*misteri kekuatan pendidikan*" yang dapat kita saksikan bersama. Saya sebut sebagai misteri, sebab tidak sedikit lulusan dari lembaga pendidikan yang maju selalu berhasil meraih kemajuan hidup sebagaimana yang dicita-citakan. Pandangan ini, tentu tidak bermaksud

melemahkan semangat memajukan lembaga pendidikan, melainkan mengajak semua pihak agar tidak menyederhanakan usaha-usaha di bidang pendidikan ini.

Sedangkan yang masuk kategori madrasah yang tumbuh, biasanya berada lingkungan masyarakat yang mengunggulkannya. Madrasah tipe ini biasanya berada di perkotaan atau pedesaan yang berekonomi kuat. Madrasah seperti ini, memiliki sumber pendanaan yang dikembangkan secara kreatif oleh para tokoh pendukungnya. Saya pernah menemukan betapa ada kegigihan yang luar biasa ditambah dengan sifat kreatif yang tinggi. Saya pernah menemukan, madrasah yang dibiayai dari sumber usaha-usaha setempat, seperti dari hasil menyewakan perahu nelayan, mobil angkutan umum, hasil pertanian, dan juga hasil pengelolaan zakat masyarakat setempat. Kreativitas masyarakat seperti ini yang dapat membantu menghidupkan madrasah, sehingga madrasah tidak mengkhawatirkan kelanjutan hidupnya. Akan tetapi, sayangnya madrasah yang bernasib seperti ini jumlahnya tidak banyak. Sepanjang pengamatan saya, atas dorongan rasa ingin tahu dan mengikuti kesenangan saya, saya berkunjung ke beberapa tempat untuk bersilaturahmi ke madrasah, jumlahnya sangat kecil dan masih sulit ditemukan. Madrasah seperti ini, kira-kira yang diinginkan oleh

konsep baru sebagai madrasah yang telah melaksanakan “manajemen berbasis masyarakat” itu. Sesuatu yang diperlukan oleh madrasah yang masuk dalam kategori ini adalah bimbingan terhadap manajemen, kepemimpinan, peningkatan kualitas guru, dan insentif sebagai *reward* atas keberhasilannya membangun lembaga pendidikan.

Kategori ketiga adalah madrasah maju. Madrasah kategori ini pada umumnya berstatus negeri, atau madrasah yang dikelola oleh yayasan yang memiliki sumber pendanaan, manajemen dan kepemimpinan yang cukup kuat. Nuansa profesionalisme pada pengelolaan madrasah tipe ini lebih tampak daripada nuansa ideologis, yang juga tidak mudah dihilangkan. Beberapa madrasah tipe ini, ada di hampir setiap kota besar, seperti: Jakarta, Yogyakarta, Padang, dan yang saya tahu sendiri di Malang. Mereka sudah mampu bersaing dengan sekolah umum lainnya, baik menyangkut dukungan masyarakat, penampilan fisik, manajemen, sampai pada prestasi akademik para siswanya. Di Malang, misalnya, madrasah dipandang sebagai sekolah unggul dan diperebutkan oleh masyarakat sekalipun dengan memasang tarif melebihi sekolah umum lainnya di Malang. Madrasah seperti ini yang saya kira yang setidak-tidaknya dicita-citakan. Hanya saja, belum semua madrasah negeri mengalami

kemajuan, sebagaimana sekolah umum yang berstatus sama— sama-sama negeri—juga tidak semua maju. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan antara madrasah satu dengan lainnya berbeda-beda. Lingkungan masyarakat, manajemen, kepemimpinan, dukungan pemerintah setempat dan sebagainya ikut berpengaruh terhadap maju tidaknya lembaga pendidikan Islam ini.

Mempertimbangkan keadaan madrasah dengan berbagai tipe seperti dikemukakan di muka, belum lagi melihat sosio-kultural yang melekat pada madrasah, maka menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif, percaya diri dan mandiri terasa tidak mudah. Langkah-langkah yang harus ditempuh tidak cukup dengan menyusun pikiran-pikiran dan juga modal besar, misalnya dengan meningkatkan gaji guru, atau memilih alternatif lain, yaitu menggantinya dengan guru yang lebih baik, meningkatkan anggaran, menyediakan kurikulum yang baik, sarana dan prasarana yang memadai dan seterusnya. Semua itu penting, tetapi juga tidak akan mungkin dilakukan sedemikian cepat. Jumlah madrasah tidak sedikit, menurut angka yang pernah saya dapatkan tidak kurang dari 18 % dari seluruh lembaga pendidikan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kajian, pemahaman bersama dan juga dukungan keputusan politik. Dengan kata lain,

tidak mudah diwujudkan, memerlukan perjuangan yang lama, berat dan memerlukan waktu cukup panjang.

Dari penglihatan yang sak-sama, bagaimanapun kondisinya, madrasah tetap diperlukan oleh masyarakat. Mengabaikan madrasah sama artinya dengan mengabaikan sebagian bibit-bibit anak bangsa yang sedang tumbuh, yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Apalagi keberadaannya sudah dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah “perlakuan yang sama” terhadap seluruh lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah ini. Selayaknya bangsa ini sudah harus memandang sama dengan berbagai konsekuensinya terhadap pendidikan yang dipandang memenuhi kebutuhan dasar. Membedakan perlakuan terhadap jenis lembaga pendidikan—madrasah dan sekolah umum— negeri atau swasta, atau membedakan antara yang berada pada pengelolaan departemen yang berbeda, sudah tidak tepat lagi. Aneka ragam jenis lembaga pendidikan—madrasah dan sekolah umum— harus dipahami sebagai refleksi dari warga bangsa ini yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Jika saja selama ini terdapat lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, semestinya dianggap sebagai produk dari

fenomena sejarah dan sosiologis masa lalu saja. Ke depan seharusnya diberlakukan sama.

Madrasah yang berstatus swasta yang jumlahnya justru lebih besar, tidak kurang 90% dari keseluruhannya, yang pada umumnya berkeadaan sangat lemah, disebabkan oleh keterbatasan dana, fasilitas maupun pendukung lainnya, maka perlu strategi tepat untuk menolong kehidupannya. Kekuatan utama lembaga pendidikan, berada pada posisi gurunya. Peran guru tidak dapat digantikan orang lain. Karena itu guru, diakui sangat strategis dalam semua aktifitas pendidikan. Saya selalu, menyampaikan rumus bahwa *"Siapa saja yang ingin membangun bangsa, maka bangunlah pendidikannya. Dan siapa saja ingin membangun pendidikan, maka hendaklah memuliakan guru-gurunya"*. Para guru madrasah, lebih-lebih yang berstatus guru honorarium, merasakan sebuah posisi yang mulia, tetapi dari sisi keadaan ekonominya sangat menderita. Di antara mereka terdapat yang memiliki idealisme tinggi untuk memperjuangkan keyakinannya yang dianggap benar sebagai pendidik agama; dan sebagian lagi mungkin mengajar karena didorong oleh kenyataan sulitnya mencari pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, apa pun motivasi yang berada di benak masing-masing, tokoh mereka telah mengabdikan diri di dunia pendidikan, lapangan yang

sangat strategis untuk menyiapkan generasi bangsa mendatang.

Atas dasar pikiran ini, saya sesungguhnya berharap agar ada gerakan baru membela para guru madrasah. Saya yakin, jika para guru madrasah sekalipun tidak diangkat menjadi pegawai negeri—yang hal itu memang membutuhkan anggaran besar—setidaknya mereka diberi imbalan yang cukup, sekurang-kurangnya untuk biaya hidup keluarga mereka sehari-hari, terutama bagi mereka yang menyerahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk kehidupan madrasah. Sebagian madrasah swasta, yang sejak beberapa tahun terakhir mulai ditinggal pensiun massal oleh para guru yang berstatus PNS program UGA tahun 1970-an, memerlukan perhatian pihak-pihak yang berwenang mengambil keputusan di bidang ini.

Saya melihat bahwa pengembangan madrasah, terutama yang berstatus swasta, jika hanya akan ditempuh dengan pilihan strategi memperkuat kekuatan internalnya, akan berjalan lambat dan mungkin tidak banyak memberi arti apa-apa. Sebab pada hakikatnya, kekuatan internal—yang berkaitan penyediaan dana—apalagi madrasah di lingkungan masyarakat ekonomi lemah, tampaknya sulit dikembangkan. Konsep yang ditawarkan akhir-akhir ini dengan nama *"Managemen Berbasis Masyarakat"* (*Community-based management*),



sepanjang hal yang menyangkut pemenuhan pendanaan, hanya mungkin terpenuhi jika lembaga pendidikan itu, setidaknya-tidaknnya, berada di dalam masyarakat yang kuat secara ekonomi. Akan tetapi, jika konsep itu ditawarkan pada masyarakat ekonomi lemah, maka konsep itu tidak terlalu bisa diharapkan dapat berjalan.

Keadaan seperti itu, mau tidak mau harus memilih strategi berupa memperkuat faktor eksternal madrasah yang seharusnya menjadi kekuatan penyangganya. Kekuatan eksternal yang dimaksud adalah siapa lagi kalau bukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua belah pihak harus saling memperkuat, dan justru tidak saling melempar tanggung jawab. Pemerintah daerah berdalih bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat, mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi oleh daerah sebagaimana mengurus pendidikan di daerah pada umumnya. Akhirnya, madrasah menjadi bertambah sengsara, tidak ditopang oleh kedua-duanya, baik pusat maupun daerah.

Akhirnya, mengembangkan madrasah agar menjadi kompetitif, mandiri dan percaya diri, dan benar-benar mencerminkan jati diri pendidikan Islam, jati diri Islam dan umatnya, bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dicapai dalam waktu singkat.

Selama ini tipe ideal itu sesungguhnya sudah mulai tampak, yang muncul di beberapa wilayah Nusantara ini. Madrasah yang meraih prestasi itu memang—walaupun bukan satu-satunya—ditopang oleh kekuatan eksternal madrasah, yaitu *political will* dari pemerintah, oleh karena lembaga itu berstatus negeri ataupun karena didukung oleh yayasan penyelolanya. Sedangkan bagi madrasah yang tidak didukung oleh kekuatan eksternal yang kukuh, keadaannya berjalan apa adanya. Akan tetapi oleh karena madrasah menyimpan kekuatan berupa idealisme, cita-cita, semangat mengabdikan dan berkorban yang luar biasa, maka mereka masih tetap akan hidup sekalipun sulit untuk mengalami kemajuan.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abung, Ua, *Problematika Madrasah* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Fadjar, A. Malik, *Visi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001), diedit oleh Musthofa Syarif dan Juanda Abubakar
- Hady, M. Samsul, *Manajemen Madrasah* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Hakim, Lukman, *Madrasah Tsanawiyah Terbuka* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).

- Ladia, Farhatin, *Madrasah Model: Meraih Prestasi dan Mendongkrak Citra* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Maarif, Saiful, *Madrasah Aliyah Program Keterampilan* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Ma'arif, A. Syafii, dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Maimun, Agus dan Ahmad Sodik, *Madrasah for Tomorrow* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Qahar, Asep Abdul, *Madrasah Aliyah Keagamaan* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Sodiq, Ahmad, *Madrasah Terpadu* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).
- Suprayogo, Imam, *Reformulasi Visi Pendidikan Islam* (Malang: STAIN Press, 1999).
- Syarif, Dodi Irawan, *Daya Tampung Madrasah* (Jakarta: EMIS, Depag RI, 2001).